

ARTIKEL

**EVALUASI KEBIJAKAN MODEL PROGRAM
PEMUTAKHIRAN PENGOLAHAN DATA
PEMILIHAN UMUM**

**(Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat
Di Kabupaten Bandung Tahun 2018)**

Oleh:

NUGROHO NURMAN SASONO

NPM. 208010050



KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2023

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu Evaluasi Kebijakan Model Program Pemutakhiran Pengolahan Data Pemilihan Umum dengan lokus di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung masih ada beberapa permasalahan dalam evaluasi kebijakan pengolahan data pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Jawa Barat di KPU Kabupaten Bandung Tahun 2018.

Pendekatan dalam penelitian ini tentang evaluasi kebijakan dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah ilmu administrasi publik. Tujuan penelitian menganalisis Evaluasi Kebijakan Model Program Pemutakhiran Pengolahan Data Pemilihan Umum dengan lokus di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif dan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Model Program Pemutakhiran Pengolahan Data Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung taun 2018 sudah baik akan tetapi ada beberapa kekurangan. Hal ini bisa dilihat dari penemuan yang didapat oleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Pertama, Evaluasi Kontek Dalam pemuktahiran data pemilih masih banyak hambatan yang dimana dalam pemuktahiran data pemilih masih ada kegandaan pemilih Kedua

Evaluasi Input Dimana dalam pemuktahiran data pemilih adanya cokolit oleh PPDP masih banyak kendala dalam mencokolit masyarakat. Ketiga Evaluasi Proses dimana Dalam proses dilapangan untuk pengolahan data pemilih masih banyak data yang tidak sesuai. Keempat Evaluasi Produk Dimana masih banyak data yang tidak valid atau tidak sesuai dan harus di- perbaiki dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil agar data sesuai.

Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akan menjadi hasil jangka panjang dari pemuktahiran data pemilih yaitu Memelihara data pemilih agar update dan akurat untuk persiapan pemilu pemilihan serentak yang akan datang dan juga Terwujudnya data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Model Program Pemutakhiran Pengolahan Data Pemilihan Umum

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dipilih secara langsung dan demokratis. Pemungutan suara adalah bagian penting dari proses pilkada, hal ini dikarenakan akan menghasilkan pemimpin bangsa yang diangkat berdasarkan pilihan masyarakat dari berbagai elemen. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi.

Peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. dan PKPU Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih didalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam pemuktahiran data pemilih. Daftar pemilih yang kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh kepada terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.

Menurut Stufflebeam (2002:280) *“The most important purpose of program evaluation is not to prove but to improve”*. Artinya bahwa tujuan penting dari evaluasi adalah bukan untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sebuah program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pemuktahiran data pemilih penting untuk dievaluasi, untuk melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui program tersebut terlaksana maka evaluasi sebuah program dapat menggunakan teori yang disampaikan oleh Stufflebeam yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk.

Evaluasi Kebijakan Pemutakhiran Pengolahan Data Pemilih Umum di Kabupaten Bandung dalam Daftar pemilih prosesnya dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih masih ada data ganda baik itu ganda NIK nama sama atau NiK nama Berbeda. Maka dari itu harus terus diperbaiki dalam pemuktahiran data pemilih karena daftar pemilih yang keridibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh kepada kepada terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.

Masalah yang terjadi dalam pemuktahiran data pemilih dilihat dari 4 evaluasi menurut Stufflebeam (1991:122) evaluasi program model CIPP dibagi menjadi 4 evaluasi yaitu :

1. Evaluasi kontek

Dalam pemuktahiran data pemilih masih banyak hambatan yang dimana dalam pemuktahiran data pemilih masih ada kegandaan pemilih dimana itu harus terus diperbaiki dan dievaluasi dalam pemuktahiran data pemilih karena daftar pemilih yang keridibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Contohnya ada pemilih pindah dari desa A ke desa B akan tetapi didesa A belum di TMS sehingga mengakibatkan kegandaan.

2. Evaluasi Input

Dimana dalam pemuktahiran data pemilih adanya cokolit oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dimana kunci dalam data pemilih dimana pemilih yang terdaftar didaftar pemilih adalah pemilih de facto dan de jure menjadi salah satu solusi agar terepnuhi prinsip komperhensif, akurat dan mutakhir dalam pendataan pemilih.

3. Evaluasi Proses

Dalam proses dilapangan dalam pengolahan data pemilih masih banyak data yang tidak sesuai ada yang meninggal terus masih terdaftar yang udah pindah domisili masih ada, dan PPDP harus teliti dalam mendata pemilih.

4. Evaluasi Produk

Dimana masih banyak data yang tidak valid atau tidak sesuai dan harus diperbaiki dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil agar data sesuai, dan diperbaikinya sesuai tahapan pemilihan dan Rapat pleno Pemuktahiran data pemilih sudah sesuai data pemilihnya.

II. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian Studi Kasus. Alasan peneliti menggunakan rancangan studi kasus karena peneliti dapat memperoleh informasi yang sebenarnya dengan menggunakan rancangan studi kasus karena informasi tersebut tidak dapat diperoleh dengan teknik apapun kecuali dengan kehadiran peneliti secara langsung di lapangan. Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini memberikan sumber data lebih banyak yang diperoleh dari lapangan. Jadi studi kasus ini digunakan karena penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang Evaluasi Kebijakan Model Program Pemuktahiran pengolahan Data Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di KPU Kabupaten Bandung

Menurut Creswell (2010:87), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivis. Terdapat beberapa ciri penelitian positivis, yaitu :

1. Penelitian dimulai ketika peneliti menguji atau memverifikasi suatu teori.
2. Peneliti menguji hipotesis-hipotesis atau rumusan masalah dari teori tersebut.
3. Peneliti mendefinisikan dan mengoperasionalkan variabel-variabel yang terbentuk dari teori tersebut.
4. Peneliti mengukur atau mengobservasi variabel-variabel dengan bantuan instrumen dan dikaitkan dengan hubungannya dengan hipotesis.

Peneliti akan menguji dari teori yang dikemukakan oleh Stufflebeam (1991:122) mengenai evaluasi kebijakan publik, selanjutnya peneliti membuat dan menguji rumusan masalah dari teori tersebut, terakhir peneliti mengoperasionalkan variabel-variabel yang ada dari teori tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi Saebani (2008:122). Peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik.

Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pejabat/aparat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Keseluruhan informan ini adalah Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Informan tersebut yaitu:

- 1) Ketua KPU (1 orang)
- 2) Divisi Program dan data (1 orang)
- 3) Operator Data pemilih (2 orang)

Berdasarkan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) melalui metode wawancara mendalam dan *studi literatur*.

Instrumen utama pengumpulan data pada sebuah penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan Garna (1999:33), bahwa “instrumen penelitian adalah manusia itu sendiri, artinya peneliti perlu sepenuhnya memahami dan adaptif terhadap situasi sosial dalam kegiatan penelitian itu”. Berhubungan instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, maka dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan dengan membawa diri sendiri untuk menghimpun sebanyak mungkin data, dengan membawa alat bantu yang diperlukan antara lain: pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam serta kamera.

III. Hasil Dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan Evaluasi Program yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Bandung Dengan Menggunakan menurut Stufflebeam (2002:280) yaitu:

“Evaluasi adalah investigasi yang sistematis mengenai apakah suatu program, proyek layanan, atau kepentingan lainnya itu layak dan pantas untuk tetap dilanjutkan. Secara oprasional, evaluasi adalah proses dari menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi yang deskriptif mengenai suatu objek apakah objek tersebut layak dan pantas dalam rangka memandu pengambil keputusan, dukungan akuntabilitas, menyebarkan praktek yang efektif, dan meningkatkan pemahaman mengenai fenomena yang ada. Standar professional untuk evaluasi prinsipnya disepakati secara bersama oleh para ahli dalam melakukan dan menggunakan evaluasi untuk mengukur nilai dan kualitas evaluasi”.

Dengan Dimensi - Dimensi sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Konteks
- 2) Evaluasi Input

- 3) Evaluasi proses
- 4) Evaluasi Produk

A. Evaluasi Model program pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Tahun 2018

Evaluasi Kebijakan Pemutakhiran Pengolahan Data Pemilih Umum di Kabupaten Bandung dalam Daftar pemilih prosesnya dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih masih ada data ganda baik itu ganda NIK nama sama atau NiK nama Berbeda. Maka dari itu harus terus diperbaiki dalam pemuktahiran data pemilih karena daftar pemilih yang keridibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh kepada kepada terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.

Kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dibidang pendataan pemilih. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menggunakan aplikasi Sidalih karena. Sidalih adalah sistem yang dibuat oleh KPU RI pada Pemilu 2014 sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk memproses data pemilih hasil pemutakhiran oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PDP) pada masa pencocokan dan penelitian (coklit).

Tujuan dibuatnya aplikasi SIDALIH adalah untuk memudahkan proses input data pemilih oleh penyelenggara pemilihan serta sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat tentang data dan daftar pemilih. akan tetapi dalam pelaksanaanya banyak kendala misalnya masih banyak data pemilih

yang ganda , dibawah umur dan data meninggal masih ada. Sehingga dalam penetapan DPT perbaikan yang dilakukan oleh KPU kabupaten Bandung untuk Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat oleh Kabupaten Bandung Tahun 2018 sebanyak pemilih. Data pemutakhiran data pemilih pada pilkada kabupaten Bandung Tahun 2018 yang dilakukan oleh KPU kabupaten Bandung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3.

Perbandingan Jumlah Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Di KPU Kabupaten Bandung

No	Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah Pemilih		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	DP4	1.310.138	1.276.667	2.586.805
2.	DPS	1.175.170	1.145.935	2.321.105
3.	DPSHP	1.173.293	1.145.874	2.319.167
4.	DPT	1.179.431	1.151.421	2.330.852

Sumber: diolah dari Laporan Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di KPU Kabupaten Bandung

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan jumlah data pemilih untuk Pilgub di Kabupaten Bandung Tahun 2018 dari DPS sampai DPT terjadi kenaikan dan penurunan DPS ke DPSHP terjadi penurunan 1.938 itu terjadi karena ada yang dihapus dalam DPT akan tetapi pada tahap DPSHP sampai ke DPT terjadi kenaikan sebanyak 1.1685 pemilih. Dengan jumlah demikian dengan artinya adanya data pemilih yang bertambah. Dalam hal ini Menurut ketua Komisioner KPU Kabupaten Bandung Bapak Agus Baroya Bahwa :

“Dalam penetapan DPT merupakan suatu kewajaran karena pertumbuhan dan perpindahan penduduk serta factor lainnya yang menyebabkan perubahan jumlah data pemilih, tetapi yang perlu diperhatikan yang merupakan permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih adalah data yang digunakan belum terkini dan masalah dalam proses pemutakhiran sehingga dari penetapan DPT ke DPT perbaikan masih ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia, alih status sebagai TNI/Polri, belum cukup umur, tidak dikenal/fiktif, pindah domisili dan pemilih ganda”

Sehingga Kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, serta badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu amat dibutuhkan untuk memastikan daftar pemilih tetap Pemilu 2018 benar-benar berkualitas dan mampu melindungi hak konstitusional warga. Masyarakat juga perlu memanfaatkan fasilitas yang disediakan penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk memastikan namanya masuk daftar pemilih.

B. Evaluasi Model Konteks pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Tahun 2018

Evaluasi konteks berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi yang objektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang kekuatan dan kelemahan tentang objek tertentu. Stufflebeam (2002:287) menyatakan evaluasi konteks sebagai focus institusi dengan mengidentifikasi peluang yang menilai kebutuhan. Satu kebutuhan dirumuskan sebagai kesenjangan (*discrepancy view*) kondisi nyata (*reality*) kondisi yang diharapkan (*ideality*). Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Evaluasi konteks memberikan pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan berjalan. Selain itu, evaluasi konteks

juga bermaksud merasionalkan suatu program. Dan Indikator-indikator evaluasi konteks sebagai berikut :

1. Peluang

Mengenai hal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pengawasan dalam pengelolaan kearsipan. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu :

Sejauh mana data pemilih kabupaten Bandung apakah sesuai data pemilihnya ? Dan kemudian diperjelas oleh **Agus Baroya** selaku **Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bandung**, beliau mengatakan bahwa :

“Data pemilih Kabupaten Bandung, dalam proses pemilihan Gubernur dan wakil gubernur masih banyak data pemilih yang pindah datang, meninggal dan berusia 17 tahun. Sehingga harus diperbaiki lagi.”

Dalam pemuktahiran data pemilih masih banyak hambatan yang dimana dalam pemuktahiran data pemilih masih ada kegandaan pemilih dimana itu harus terus diperbaiki dan dievaluasi dalam pemuktahiran data pemilih karena daftar pemilih yang keridibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

2. Kebutuhan

Dan juga Apa saja kebutuhan agar data pemilih sesuai dengan masyarakat ? Dan kemudian diperjelas oleh **Agus Baroya** selaku **Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bandung**, beliau mengatakan bahwa :

“Data pemilih sesuai antara data byname di KPU dengan data yang tertera pada KTP ataupun KK yang dipegang oleh masyarakat.”

Pastikan nama Anda telah tercantum dalam daftar pemilih yang sesuai dengan data byname di KPU dan data yang tertera di KTP. Caranya kunjungi dan cek di laman hak lindungi dan Apabila nama Anda belum terdaftar atau terdapat kekuranglengkapan/kesalahan identitas, kunjungi dan laporkan ke KPU kabupaten Bandung.

3. Kekuatan

Apa yang menjadi kekuatan dari pumktahiran data pemilih ? Dan kemudian diperjelas oleh **Agus Baroya** selaku **Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bandung**, beliau mengatakan bahwa : “Kerjasama dengan Dinas Kependudukan untuk sikronisasi dan dengan aplikasi sidalih yang digunakan oleh KPU kabupaten Bandung”

Dengan sikronisasi dengan dinas kependudukan kabupaten bandung sehingga data pemilih akan lebih berkualitas dan juga dengan menggunakan aplikasi sidalih karena akan terdetek data ganda, dibawah umur dan juga data yang sudah meninggal

4. Kelemahan

Apa yang menjadi hambatan atau kelemahan data pemilih ? Dan kemudian diperjelas oleh **Agus Baroya** selaku **Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bandung**, beliau mengatakan bahwa: “Banyaknya pemilih atau masyarakat yang berpindah domisili dan orang yang meninggal tanpa mengurus administrasi ke Kecamatan atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil”

Sehingga PPK dan PPS harus melakukan verifikasi kelapangan agar mengetahui yang pindah domisili dan berkoordinasi dengan rt atau rw setempat.

5. Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan

Apa yang menjadi hambatan atau kelemahan data pemilih ? Dan kemudian diperjelas oleh **Agus Baroya** selaku **Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bandung**, beliau mengatakan bahwa: “Menyasar pemilih pemula yang berada di Sekolah Menengah Atas dan juga sosialisasi terakait data pemilih yang berkualitas”

6. Program Kegiatan yang benar-benar dibutuhkan

Kegiatan apa yang menjadi kebutuhan utama agar data pemilih sesuai? Dan kemudian diperjelas oleh **Agus Baroya** selaku **Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bandung**, beliau mengatakan bahwa: Updating dan sinkronisasi

data dengan Dinas Kependudukan serta menyasar pemilih pemula di Sekolah Menengah Atas.

C. Evaluasi Model Input pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Tahun 2018

Evaluasi input kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam proses perubahan menurut Stufflebeam (2002:292) “Untuk memilih sumber dukungan, strategi solusi dan design prosedur, untuk perubahan penataan aktivitas dan untuk menyediakan dasar untuk menilai Evaluasi”.

Jadi orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untuk membantu merencanakan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan yang dibutuhkan jenis penelitian harus mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang relevan (termasuk yang sudah beroperasi) dan membantu dalam memberi penjelasan dan menentukan prioritas yang akan digunakan untuk kelanjutan dari program tersebut.

Dimana dalam pemuktahiran data pemilih adanya cokit oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dimana kunci dalam data pemilih dimana pemilih yang terdaftar didaftar pemilih adalh pemilih de facto dan de jure menjadi salah satu solusi agar terepnuhi prinsip komperhensif,akurat dan mutakhir dalam pendataan pemilih. Dengan Indikator-Indikator sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Seberapa banyak SDM yang dibutuhkan, sudah mencukupi apa belum dan sudah sesuai keahliannya atau belum? Dan kemudian diperjelas oleh **Agus Baroya** selaku **Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bandung**, beliau mengatakan bahwa: “Dengan data pemilih yang terbanyak kedua se-Indonesia, Kebutuhan SDM yang mempunyai keahlian dalam mengolah data sebanyak 8 orang untuk dibagi menjadi 8 wilayah kerja”

Jadi untuk Untuk Satker KPU Kab. Bandung perlu ditambah tetapi bila melibatkan Pemda di Kecamatan akan sangat mencukupi. Dan selain itu juga dalam pencoklitan oleh PPDP harus teliti dalam coklit ke masyarakat agar dapat data pemilih yang berkualitas.

2. Sumber Daya Anggaran

Apakah sumber daya anggarannya sudah mencukupi atau belum untuk kebutuhan program agar tujuan program tercapai? Dan kemudian diperjelas oleh **Agus Baroya** selaku **Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bandung**, beliau mengatakan bahwa : “ Belum mencukupi untuk program data pemilih karena memerlukan anggaran yang lebih besar untuk membuat aplikasi data pemilih yang berkualitas”

Sehingga dalam program data pemilih ini harus dapat anggaran yang lebih besar daripada kegiatan yang lainnya karena memerlukan anggaran yang besar untuk membuat suatu aplikasi data pemilih yang berkualitas agar tidak ada data pemilih yang ganda.

3. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Bagaimana sarana dan prasarana untuk menakomodir kebutuhan data pemilih agar akurat? Dan kemudian diperjelas oleh **Ipan Yuspian** selaku **Staff Program Data Pemilih KPU Kabupaten Bandung**, beliau mengatakan bahwa : “Belum mencukupi karena memerlukan kapasitas server yang sangata besar sehingga dapat menampung data pemilih lebih banyak”

Sehingga dalam sarana dan prasarananya harus memerlukan kapasitas yang lebih besara dan juga internet yang lebih cepat agar dalam mengiri data atau memasukan data pemilih ke aplikasi sidalih tidak ada kendala dan gangguan.

4. Input Program Kegiatan

Menyangkut apa saja yang menjadi prioritas kegiatan yang akan dijalankan apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. ? Dan kemudian diperjelas oleh **Ipan Yuspian** selaku **Staff Program Data Pemilih KPU Kabupaten Bandung**, beliau mengatakan bahwa : “Sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan”

Karena dengan sinkronisasi dengan dinas kependudukan akan mendapatkan data yang lebih akurat agar tidak ada data pemilih yang ganda dan mendapatkan data yang sangat berkualitas.

D. Evaluasi Model Proses pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Tahun 2018

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik Evaluasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tatalaksana kejadian maupun aktivitas. Setiap aktivitas memonitor perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas harian demikian penting karena berguna bagi pengambil keputusan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan atau program dikaitkan dengan keluaran yang ditemukan.

Dalam prosesnya pemuktahiran data pemilih sudah sesuai dengan yang direncanakan dari tahap perencanaan, SDM yang terlibat, jadwal kegiatan, hingga proses evaluasi program itu sudah sesuai karena sesuai tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

E. Evaluasi Model Produk pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Tahun 2018

Evaluasi produk atau akhir diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada input mentah. Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi dan akan diketahui ketercapaian tujuan, kesesuaian proses dengan pencapaian tujuan, dan ketepatan tindakan yang diberikan, dan dampak dari program.

Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi.

Pengukuran dikembangkan dan diadministrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sesuai standar kelayakan. Secara garis besar, kegiatan evaluasi produk meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, membandingkan antara kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional.

Akan menjadi hasil jangka panjang dari pemuktahiran data pemilih yaitu Memelihara data pemilih agar update dan akurat untuk persiapan pemilu pemilihan serentak yang akan datang dan juga Terwujudnya data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat.

IV. KESIMPULAN

Evaluasi Kebijakan Pemutakhiran Pengolahan Data Pemilih Umum di Kabupaten Bandung dalam Daftar pemilih prosesnya dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih masih ada data ganda baik itu ganda NIK nama sama atau NiK nama Berbeda. Maka dari itu harus terus diperbaiki dalam pemuktahiran data pemilih karena daftar pemilih yang keridibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh kepada kepada terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat

sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.

1. Evaluasi kontek

Dalam pemuktahiran data pemilih masih banyak hambatan yang dimana dalam pemuktahiran data pemilih masih ada kegandaan pemilih dimana itu harus terus diperbaiki dan dievaluasi dalam pemuktahiran data pemilih karena daftar pemilih yang keridibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

2. Evaluasi Input

Dimana dalam pemuktahiran data pemilih adanya cokolit oleh PPDP (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih) dimana kunci dalam data pemilih dimana pemilih yang terdaftar didaftar pemilih adalah pemilih de facto dan de jure menjadi salah satu solusi agar terepnuhi prinsip komperhensif, akurat dan mutakhir dalam pendataan pemilih

3. Evaluasi Proses

Dalam prosesnya pemuktahiran data pemilih sudah sesuai dengan yang direncanakan dari tahap perencanaan, SDM yang terlibat, jadwal kegiatan, hingga proses evaluasi program itu sudah sesuai karena sesuai tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bandung.

4. Evaluasi Produk

Pengukuran dikembangkan dan diadministrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sesuai standar kelayakan.

Akan menjadi hasil jangka panjang dari pemuktahiran data pemilih yaitu Memelihara data pemilih agar update dan akurat untuk persiapan pemilu pemilihan serentak yang akan datang dan juga Terwujudnya data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Albrow, Martin. (2007). *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Amalia, Haris dan Nuryanti. 2016. *Evaluasi Pemilu legislative 2014*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: Raja Grafindo
- Gaffar.J.M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta Konstitusi Press
- Handyaningrat, Soewarno. 1995. *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
- <https://kab-bandung.kpu.go.id/>
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.
- Kasim, M. 1994. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita Winarno.2005.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.Persada.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Perubahan dan Inovasi Kebijakan dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- S. Pamungkas 2015. *Perilaku Pemilu*. Yogyakarta:Megatama
- Silalahi. 1989. *Sistem Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sobandi, Baban. 2002. *Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Mutiara Ilmu.
- Stufflebeam, Daniel L. (2007). *Evaluasion: Theory, Model, application*:
- Subarsono, AG.2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*.
- Sugiono. 1992. *Metoda Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suradinata, Ernmaya. 1993. *Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan*.
Bandung: Mandar Maju

Jurnal:

Elvi Juliansyah (2011) dalam jurnal dengan judul : Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Abdurrahman (2011) dalam tesis dengan judul : Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Sintang Tahun 2009.

David Susanto (2013) dalam jurnal dengan judul : Implementasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT) dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Kota Medan).

Undang-Undang :

PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.